

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teoritis

1. Pembangunan Pertanian

Pertanian mempunyai peran yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Pentingnya peran ini menyebabkan bidang ekonomi diletakkan pada pembangunan ekonomi dengan titik berat pada sektor pertanian. Pembangunan pertanian diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan *eksport*, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha.

Pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, bahan baku industri, memperluas lapangan kerja, dan lapangan berusaha, pelaksanaan kesejahteraan rakyat khususnya dipedesaan, pelaksanaan pendapatan nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan (UU SP3K No. 16 Tahun 2006).

Pada permbangunan pertanian mendefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh manusia (petani) didalam produksi usahatani yang memanfaatkan tanaman dan atau hewan dengan tujuan untuk selalu dapat memperbaiki kesejahteraan atau kualitas hidup (petani) pengelolanya (Mardikanto,2007). Pada proses pembangunan pertanian, Revikasari (2010) juga memaparkan bahwa, perbaikan kualitas hidup yang dicita-citakan itu diupayakan melalui kegiatan peningkatan produktivitas usahatani, yakni melalui semakin besarnya turut campur tangan manusia (petani) selama proses produksi berlangsung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, pembangunan pertanian menuntut adanya perubahan perilaku petani yang mutlak diperlukan dalam upaya peningkatan produktivitas usahatani dan peningkatan pendapatan demi perbaikan kualitas hidupnya sendiri dan masyarakatnya.

Mardikanto (2009) mensyaratkan beberapa hal untuk mewujudkan pembangunan pertanian diantaranya yaitu :

1. Adanya kejelasan tentang kebijakan pembangunan pertanian.

2. Adanya penyuluh pertanian yang berkelanjutan, untuk mengkomunikasikan program dan kegiatan pembangunan pertanian, serta memberdayakan masyarakat agar mampu dan mau berpartisipasi secara aktif.
3. Adanya pasar permintaan hasil-hasil pertanian yang merangsang petani untuk berproduksi secara berkelanjutan.
4. Tersedianya paket teknologi yang diperlukan untuk memproduksi, sesuai dengan (permintaan) pasar.
5. Tersedianya kredit bagi petani, baik utamanya berupa kredit produksi dan biaya hidup.
6. Adanya penelitian dan pengembangan yang menghasilkan inovasi teknologi.
7. Adanya pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pembangunan pertanian, utamanya untuk pengairan dan pengangkutan.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa, pembangunan pertanian merupakan proses meningkatkan kualitas pertanian bukan hanya produksi saja untuk mencapai keberhasilan pembangunan, namun ada aspek-aspek lain yang mesti diperhatikan secara khusus dalam mengembangkan SDM petani. Penyuluh memegang peran penting dalam pembangunan pertanian untuk membimbing petani agar dapat memberikan yang terbaik dalam pengelolaan usahatani yang dilakukannya. Untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan petani guna menumbuhkan peran petani dalam pembangunan pertanian, maka pada penyuluh diperlukan pendekatan melalui kelompok tani Mardikanto (2007).

2. Kebijakan Pemerintah

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani dijelaskan bahwa untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan diperlukan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha profesional, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis. Oleh karena itu, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha mampu membangun usahatani yang berdaya saing dan

berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya. Untuk itu, kapasitas dan kemampuan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha terus ditingkatkan, salah satunya melalui penyuluhan dengan pendekatan pembinaan kelembagaan petani yang mencakup penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani, sehingga petani dapat berkumpul untuk menumbuhkembangkan kelembagaannya menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan.

Penguatan kelembagaan petani sangat diperlukan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan petani. Oleh karena itu, petani dapat menumbuh kembangkan kelembagaan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani itu sendiri sesuai dengan perpaduan antara budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUUXI/2013 bahwa pasal 70 ayat (1), harus dimaknai sebagai kelembagaan petani termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani, Peraturan menteri pertanian nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani perlu disempurnakan, sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha dalam pelayanan dan pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani.

Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Sedangkan Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.

Pemberdayaan petani, kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) menjadi kelembagaan yang mandiri dan berdaya saing, melalui:

- a. Peningkatan manajemen pengelolaan kelembagaan petani Dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP);
- b. Pemberdayaan petani melalui pelatihan dan magang di bidang pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan ketahanan pangan di P4S;

- c. Penumbuhan dan pengembangan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes);
- d. Pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal melalui pengembangan masyarakat (*Community Development*);
- e. Pengembangan kelembagaan petani dan KEP melalui pengembangan jejaring dan kemitraan usaha;
- f. Pengawasan dan pendampingan penyuluh pertanian di sentra produksi melalui rebug tani, kursus tani, hari lapang petani, dan lainnya;
- g. Pengawasan dan pendampingan penyuluh pertanian dalam penyusunan Rancangan Definitif Kelompok (RDK) dan Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
- h. Peningkatan kemampuan kelembagaan petani dan KEP;
- i. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani seperti kelompok tani (Poktan), Gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan KEP.

3. Penyuluhan Pertanian

a. Pengertian Penyuluhan Pertanian

Penyuluh adalah orang yang memberikan dorongan kepada para petani agar mau mengubah cara berfikirnya dan cara hidupnya yang lama dengan cara yang baru melalui proses penyebaran informasi seperti pelatihan, kursus, kunjungan yang berkaitan dengan perubahan dan perbaikan cara-cara berusahatani, usaha peningkatan produktivitas pendapatan petani serta perbaikan kesejahteraan keluarga petani atau masyarakat. Sesuai dengan UU No. 16 tahun 2006, penyuluh dibedakan berdasarkan status dan lembaga tempatnya bekerja yaitu: Penyuluh PNS ialah pegawai negeri yang ditetapkan dengan status jabatan fungsional sebagai penyuluh. Penyuluh swasta ialah penyuluh yang berstatus sebagai karyawan perusahaan swasta (produsen pupuk, pestisida, perusahaan benih/alat/mesin pertanian). Penyuluh swadaya ialah petani atau warga masyarakat yang secara sukarela melakukan kegiatan penyuluhan dilingkungannya, termasuk didalamnya, penyuluh yang diangkat dan atau memperoleh imbalan dan oleh masyarakat lingkungannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, penyuluhan diartikan sebagai

proses pembelajaran bagi pelaku utama agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penyuluhan merupakan suatu kegiatan yang melibatkan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sasarnya memberikan pendapat sehingga dapat membuat keputusan yang benar.

b. Peran Penyuluh

Penyuluh pertanian adalah seseorang yang mengemban tugas dengan memberikan dorongan dan dukungan kepada petani agar mau mengubah cara berfikir, cara kerja dan cara hidup yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi pertanian yang semakin lebih maju.

Kehadiran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan peranan dari sosok penyuluh pertanian di tengah-tengah masyarakat tani di suatu desa masih sangat dibutuhkan guna untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (petani) sehingga mampu mengelola sumber daya alam yang ada secara intensif demi tercapainya peningkatan produktifitas dan pendapatan atau tercapainya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi. Memberdayakan petani-nelayan dan keluarganya melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian, bertujuan untuk mencapai petani-nelayan yang tangguh sebagai salah satu komponen untuk membangun pertanian yang maju, efisien dan tangguh sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Menurut Widodo T (2007), banyak ahli menjelaskan tentang peran penyuluh ini antara lain :

- a. Sebagai motivator adalah penyuluh senantiasa membuat petani tahu, mau dan mampu/dorongan atau support kepada petani untuk mencapai maksud atau tujuan tertentu.
- b. Sebagai dinamisator adalah menumbuhkan kedinamisan petani, untuk mencapai kedinamisan tersebut, petani memerlukan bantuan penyuluh sebagai penggerak dan pemberi informasi dan teknik-teknik baru dari luar yang berhasil dan layak dicontoh atau diterapkan di wilayah usahatannya melalui pelayanan.

- c. Sebagai inovator adalah penyuluh harus mempunyai strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan petani, mencari gagasan yang baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, menjadi teladan bagi petani dan mengembangkan teknologi dan gagasan.
- d. Sebagai fasilitator adalah penyuluh senantiasa memberikan jalan keluar/kemudahan, baik dalam penyuluh/proses belajar, maupun fasilitas dalam memajukan usahatani. Dalam hal penyuluh penyuluh memfasilitasi dalam hal pemeliharaan kelapa sawit.
- e. Sebagai edukator yaitu mengubah perilaku dalam sikap, pengetahuan dan keterampilan petani.

Peran penyuluh merupakan suatu rangkaian kegiatan sebagai fasilitas proses belajar, member motivasi, sumber informasi terbaru, pendampingan, pemecahan masalah, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan petani untuk mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Variabel dan indikator peran penyuluh ini dapat diukur melalui: motivator, dinamisator, inovator dan fasilitator serta edukator.

c. Fungsi Penyuluhan

Demi memantapkan kegiatan penyuluhan pertanian yang terkait dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2006 tentang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan maka diketahui fungsi penyuluh sebagai berikut :

1. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha.
2. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumber daya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya.
3. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha. Membantu pelaku utama dan usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya.
4. Meningkatkan ekonomi yang berdaya saing tinggi, menerapkan tata kelola yang baik dan berkelanjutan; membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha.

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan.
6. Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

4. Kelompok Tani

a. Pengertian Kelompok Tani

Kelompok merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama, sehingga terdapat hubungan timbal balik dan saling berpengaruh mempengaruhi serta memiliki kesadaran untuk saling tolong menolong (Mardikanto, 2009). Begitu juga menurut Erwadi (2012) kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut.

b. Pengembangan Kelompok Tani

Salah satu upaya pengembangan kelompok tani yang ingin dicapai adalah dengan terwujudnya kelompok tani yang dinamis, dimana para petani mempunyai sikap disiplin, bertanggung jawab dan terampil dalam membangun kerjasama mengelola kegiatan usahatani, serta upaya meningkatkan skala usaha dan peningkatan usaha kearah yang lebih besar dan bersifat komersial, kelompok tani dapat dikembangkan melalui kerjasama antar kelompok dengan membentuk Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) yang merupakan Wadah Kerja Sama Antar Kelompok Tani (WKAK). Pengembangan kelompok merupakan suatu serangkaian proses kegiatan memampukan atau memberdayakan kumpulan anggota masyarakat yang memiliki tujuan bersama.

Pada proses pengembangan kelompok dimulai dari tahapan proses pengenalan akan program, berlanjut pada kajian keadaan pedesaan secara partisipatif dan diperkuat ketika masyarakat merasa perlu berbagi tugas dan tanggung jawab dalam melakukan kegiatan yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang mereka hadapi. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pendekatan pengembangan kelompok adalah :

- a. Keanggotaan tidak terikat oleh jumlah.
- b. Perlu memperhatikan keterlibatan kaum perempuan.
- c. Berpihak pada mereka yang miskin sumberdaya, tidak berpendidikan dan 'kelompok terabaikan' lainnya.
- d. Orientasi kegiatan berdasarkan kebutuhan; bukan ditentukan komoditasnya oleh pihak luar.
- e. Aspek keswadayaan tercermin dalam setiap kegiatan, termasuk pembiayaan.
- f. Kelompok sebagai pelaku utama pengambilan keputusan.
- g. Demokratis, terbuka/transparan.
- h. Berwawasan lingkungan dan budaya.
- i. Mengoptimalkan sumberdaya lokal.
- j. Peran masyarakat semakin meningkat, peran pendamping semakin berkurang.

Proses penumbuhan kelompok tani antara lain sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi kelompok-kelompok tani yang mempunyai jenis usaha hampir sama pada wilayah tertentu (sentra/kawasan pertanian).
- b. Setiap kelompok mengadakan koordinasi untuk bekerjasama antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya.
- c. Melaksanakan pertemuan/musyawarah antar pengurus kelompok (yang mewakili kelompok) untuk membuat kesepakatan – kesepakatan usaha dengan skala yang lebih besar dalam upaya memperkuat posisi tawar (*bergaining position*).
- d. Membuat aturan-aturan yang pengikat (sebaiknya secara tertulis) terhadap kesepakatan dari musyawarah antar kelompok tersebut serta sanksi-sanksinya apabila terjadi pelanggaran kesepakatan.
- e. Menentukan pengurus dari kelompok tani tersebut untuk melaksanakan kegiatan usaha bersama sesuai dengan kebutuhan kelompok tani tersebut. Penentuan pengurus kelompok tani harus dapat mewakili kepentingan dari semua kelompok yang bergabung.
- f. Membuat Berita Acara yang diketahui oleh Instansi Pemerintah terkait.
- g. Adanya Rencana Usaha bersama (RUB).

c. Fungsi Kelompok Tani

Berbagai peluang dan hambatan yang muncul sesuai dengan lingkungan sosial ekonomi setempat, membutuhkan adanya pengembangan kelompok tani ke dalam suatu organisasi yang jauh lebih besar. Beberapa orang petani yang tergabung ke dalam kelompok tani dapat dilakukan oleh penyuluh yang berada dalam satu wilayah administrasi pemerintahan untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif. Hal ini dilakukan agar kelompok tani dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani ke sektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerja sama dalam peningkatan posisi tawar. Terdapat beberapa fungsi Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) antara lain :

- a. Merupakan satu kesatuan unit produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan harga).
- b. Penyediaan sarana produksi tananaman atau saprotan (pupuk bersubsidi, benih bersertifikat, pestisida dan lainnya) serta menyalurkan kepada para petani melalui kelompoknya.
- c. Penyediaan modal usaha dan menyalurkan secara kredit/ pinjaman kepada para petani yang memerlukan.
- d. Melakukan proses pengolahan produk para anggota (penggilingan, grading, pengepakan dan lainnya) yang dapat meningkatkan nilai tambah.
- e. Menyelenggarakan perdagangan, memasarkan/menjual produk petani kepada pedagang/industri hilir.

d. Peran Kelompok Tani

Keberadaan kelompok tani merupakan salah satu potensi yang memiliki peranan penting dalam membentuk perubahan perilaku anggotanya dan menjalin kemampuan kerjasama antar anggota kelompoknya. Melalui kelompok tani, proses pelaksanaan kegiatan melibatkan anggota kelompok dalam berbagai kegiatan bersama, akan mampu mengubah atau membentuk wawasan, pengertian, pemikiran minat, tekad dan kemampuan perilaku berinovasi menjadikan sistem pertanian yang maju. Banyak hal positif yang akan tercipta ketika usaha tani ini dilakukan secara bersama, atau dapat disebut secara berkelompok. Dengan begitu diharapkan pembangunan pertanian akan berjalan

dengan cepat sesuai dengan salah satu tujuannya yaitu dengan meningkatkan kesejahteraan petani.

Menurut Mardikanto (2009) ada beberapa keuntungan dari pembentukan Kelompok tani, antara lain sebagai berikut :

1. Semakin eratnya interaksi dalam kelompok dan semakin terbinanya kepemimpinan kelompok.
2. Semakin terarahnya peningkatan secara cepat tentang jiwa kerja sama antar petani.
3. Semakin cepatnya proses perembesan difusi inovasi teknologi baru.
4. Semakin naiknya kemampuan rata-rata pengembalian hutang (pinjaman) petani.
5. Semakin meningkatnya orientasi pasar, baik yang berkaitan dengan masukan (input) maupun produk yang dihasilkannya.
6. Semakin dapat membantu efisiensi pembagian air irigasi serta pengawasannya oleh petani sendiri.

5. Kelembagaan Ekonomi Petani

Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan fungsi kelembagaan petani merupakan bagian pranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial atau social interplay dalam suatu komunitas. Kelembagaan petani juga memiliki titik strategis (*entry point*) dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu segala sumberdaya yang ada di pedesaan perlu diarahkan/diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan posisi tawar petani (kelompok tani). Saat ini potret petani dan kelembagaan petani di Indonesia diakui masih belum sebagaimana yang diharapkan (Suradisastra, 2008).

Menurut Permentan No. 67 tahun 2016 yang dimaksud Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usahatani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan

efisiensi usahatani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.

Menurut Dimiyati (2007), permasalahan yang masih melekat pada sosok petani dan kelembagaan petani di Indonesia adalah :

1. Masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran.
2. Belum terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis. Aktivitas petani masih terfokus pada kegiatan produksi (*on farm*).
3. Peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu maka dilakukannya upaya pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan petani (seperti: kelompok tani, lembaga tenaga kerja, kelembagaan penyedia input, kelembagaan output, kelembagaan penyuluh, dan kelembagaan permodalan) dan diharapkan dapat melindungi *bargaining position* petani. Tindakan perlindungan sebagai keberpihakan pada petani tersebut, baik sebagai produsen maupun penikmat hasil jerih payah usahatani mereka terutama diwujudkan melalui tingkat harga output yang layak dan menguntungkan petani. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penguatan dan pemberdayaan kelembagaan tersebut juga untuk menghasilkan pencapaian kesinambungan dan keberlanjutan daya dukung Sumber Daya Alam (SDA) dan berbagai usaha untuk menopang dan menunjang aktivitas kehidupan pembangunan pertanian di pedesaan.

Kemandirian petani melalui kelembagaan petani memiliki arti penting dalam pembangunan pertanian ke depan. Kemandirian petani, menurut Soedijanto (2004), meliputi :

- a. Kemandirian material, artinya memiliki kapasitas untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumberdaya alam yang mereka miliki sendiri tanpa harus menunggu bantuan orang lain atau tergantung dari luar;
- b. Kemandirian intelektual, artinya memiliki kapasitas untuk mengkritisi dan mengemukakan pendapat tanpa dibayangi oleh rasa takut atau tekanan dari pihak lain;

- c. Kemandirian pembinaan, artinya memiliki kapasitas untuk mengembangkan diri sendiri melalui proses belajar tanpa harus tergantung pihak luar; dan
- d. Sebagai manusia yang interdependensi, artinya dalam melaksanakan kegiatannya selalu terdapat saling ketergantungan dengan manusia lain di dalam masyarakatnya sebagai suatu sistem sosial.

6. Sub Terminal Agribisnis (STA)

Menurut Badan Agribisnis Departemen Pertanian (2000), Sub Sistem Agribisnis (STA) merupakan infrastruktur pemasaran untuk transaksi jual beli hasil-hasil pertanian, baik transaksi fisik (lelang, langganan, pasar spot) maupun non fisik (kontrak pesanan, *future market*). STA diharapkan berfungsi pula untuk pembinaan peningkatan mutu produksi sesuai dengan permintaan pasar, pusat informasi, promosi dan tempat latihan atau magang dalam usaha pengembangan peningkatan sumber daya manusia.

STA sebagai suatu infrastruktur pasar, tidak saja merupakan tempat transaksi jual beli, namun juga merupakan wadah yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan pelaku agribisnis, seperti sarana dan prasarana pengemasan, sortasi, grading, penyimpanan, ruang pameran (*operating room*), transportasi dan pelatihan. Selain itu, STA sekaligus merupakan tempat berkomunikasi dan saling tukar informasi bagi para pelaku agribisnis.

Badan Agribisnis Pertanian pada tahun 2000 membakukan sebuah konsep Sub terminal Agribisnis (STA) yang merupakan perwujudan atas fenomena yang selama ini berkembang dalam pemasaran komoditas pertanian dan sekaligus sebagai bagian dari rangkaian kegiatan agribisnis. Pemasaran komoditas pertanian selama ini, pada umumnya mempunyai mata rantai yang panjang, mulai dari petani produsen, pedagang pengumpul, pedagang besar hingga konsumen, sehingga mengakibatkan kecilnya keuntungan yang diperoleh petani. Konsumen membayar lebih mahal dari harga yang selayaknya ditawarkan sehingga biaya pemasaran (*marketing cost*) dari produsen ke konsumen menjadi tinggi.

a. Manfaat Sub Terminal Agribisnis (STA)

Sub Terminal Agribisnis (STA) sebagai infrastruktur pemasaran berdasarkan konsep dari Badan Agribisnis Departemen Pertanian (2000); diharapkan bermanfaat untuk :

1. Memperlancar kegiatan dan meningkatkan efisiensi pemasaran komoditas agribisnis (pusat transaksi hasil-hasil agribisnis, jaringan pemasaran, pusat informasi komoditas pertanian, dan sarana promosi produk pertanian).
2. Mempermudah pembinaan mutu hasil-hasil agribisnis yang meliputi penyediaan tempat sortasi dan pengemasan, penyediaan air bersih, es, gudang, *cool room* dan *cold storage*, melatih para petani dan pedagang dalam penanganan dan pengemasan hasil-hasil pertanian.
3. Sebagai wadah bagi pelaku agribisnis untuk merancang bangun pengembangan agribisnis, mensinkronkan permintaan pasar dengan manajemen lahan. Pola tanam, kebutuhan saprodi dan permodalan serta peningkatan SDM pemasaran (Sukmadinata, 2001).

b. Sasaran Utama Pembangunan Sub Terminal Agribisnis

Sasaran utama pembangunan Sub Terminal Agribisnis pada dasarnya adalah meningkatkan nilai tambah bagi petani dan pelaku pasar. Sasaran lainnya adalah mendidik petani untuk memperbaiki kualitas produk, sekaligus merubah pola pikir ke arah agribisnis sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah serta mengembangkan akses pasar (Badan Agribisnis Departemen Pertanian, 2000).

Pengelolaan STA dapat dilakukan oleh koperasi pelaku agribisnis, dalam hal ini petani, nelayan, pengolah serta pedagang; gabungan koperasi pelaku agribisnis dengan pemerintah daerah atau bahkan bisa dilakukan oleh pengusaha swasta, baik nasional maupun asing dan nasional dengan koperasi (Sukmadinata,2001).

7. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Peran Anggota Kelompok Tani Dalam Membangun Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui Sub Terminal Agribisnis (STA) di Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

Beberapa faktor – faktor dibawah ini merupakan landasan pengkaji dalam memilih aspek apa saja yang dapat mempengaruhi Peran Anggota Kelompok Tani Dalam Membangun Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui Sub Terminal Agribisnis (STA) di Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Pengkajian Erwandi (2016) menyatakan bahwa peran penyuluh pertanian memberikan pengaruh terhadap tingkat keaktifan anggota kelompok tani dalam mengikuti kegiatan kelompok, hal ini sejalan dengan pendapat Indrawati, dkk (2009) bahwa aktifnya anggota dalam kelompok tani akan menumbuhkan kedinamisan kelompok tani. Tampubolon, dkk (2006) menyebutkan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan kelompok adalah adanya kepemimpinan dalam kelompok. Sehubungan dengan itu, kelompok tani juga dibangun agar para petani memiliki kemandirian dalam usaha tani serta mampu mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilannya tentang sesuatu yang baru (Mardikanto, 1993). Dalam hal ini untuk memperkuat kelompok tani, kapasitas dan kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha harus terus ditingkatkan, salah satunya melalui penyuluhan dengan pendekatan pembinaan kelembagaan petani yang mencakup penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani, sehingga petani dapat berkumpul untuk menumbuhkembangkan kelembagaannya menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan yang tertuang sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia, nomor: 67/permentan/sm.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.

1. Aspek Peran Penyuluh Pertanian

a. Peran Penyuluh

Penyuluh pertanian adalah seseorang yang mengemban tugas dengan memberikan dorongan dan dukungan kepada petani agar mau mengubah cara befikir, cara kerja dan cara hidup yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi pertanian yang semakin lebih maju.

Kehadiran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan peranan dari sosok penyuluh pertanian di tengah-tengah masyarakat tani di suatu desa masih sangat dibutuhkan guna untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (petani) sehingga mampu mengelola sumber daya alam yang ada secara intensif demi tercapainya peningkatan produktifitas dan pendapatan atau tercapainya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi. Memberdayakan petani-nelayan dan keluarganya melalui penyelenggaraan penyuluh pertanian, bertujuan untuk mencapai petani-nelayan yang tangguh sebagai salah satu komponen untuk membangun pertanian yang maju, efisien dan tangguh sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera (Djari, 2001).

Menurut Widodo T (2007), banyak ahli menjelaskan tentang peran penyuluh ini antara lain :

- a. Sebagai motivator adalah penyuluh senantiasa membuat petani tahu, mau dan mampu/dorongan atau support kepada petani untuk mencapai maksud atau tujuan tertentu.
- b. Sebagai dinamisator adalah menumbuhkan kedinamisan petani, untuk mencapai kedinamisan tersebut, petani memerlukan bantuan penyuluh sebagai penggerak dan pemberi informasi dan teknik-teknik baru dari luar yang berhasil dan layak dicontoh atau diterapkan di wilayah usahatannya melalui pelayanan.
- c. Sebagai inovator adalah penyuluh harus mempunyai strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan petani, mencari gagasan yang baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, menjadi teladan bagi petani dan mengembangkan teknologi dan gagasan.
- d. Sebagai fasilitator adalah penyuluh senantiasa memberikan jalan keluar/kemudahan, baik dalam penyuluh/proses belajar, maupun fasilitas dalam memajukan usahatannya.
- e. Sebagai edukator yaitu mengubah perilaku dalam sikap, pengetahuan dan keterampilan petani.

Peran penyuluh merupakan suatu rangkaian kegiatan sebagai fasilitas proses belajar, member motivasi, sumber informasi terbaru, pendampingan, pemecahan masalah, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan petani untuk

mendukung pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Variabel dan indikator peran penyuluh ini dapat diukur melalui: motivator, dinamisator, inovator dan fasilitator serta edukator.

2. Aspek Peran Ketua Kelompok Tani

Peran ketua kelompok tani dapat disejajarkan dengan fungsi seorang pemimpin. Dari hasil Pengkajian oleh Hanan, Pulungan, dan Lumintang (2005) memperlihatkan bahwa fungsi atau peran yang dapat dijalankan oleh seorang pemimpin antara lain sebagai pihak yang membantu :

1. Mencapai tujuan usaha;
2. Memperlancar tujuan komunikasi;
3. Meningkatkan motivasi petani;
4. Memperlancar fasilitas; dan
5. Memecahkan masalah.

Melalui fungsi atau peran kepemimpinan ini, ketua kelompok tani diharapkan mampu mendinamisasi kelompok dalam memecahkan masalah, dengan meminta bantuan penyuluh apabila diperlukan.

Dengan adanya ketua kelompok tani ini, menjadi salah satu kewajiban didirikannya kelompok tani. Ketua kelompok tani harus berperan sebagai kunci dalam memberdayakan kelompok tani yang dipimpinnya menuju kelompok tani yang mandiri. Ketua kelompok tani yang baik adalah yang bersedia bekerjasama sebagai partner penyuluh pertanian dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyuluh pertanian bagi kelompok tani dan masyarakat sekitarnya.

3. Aspek Kemandirian Petani

Kemandirian petani, menurut Soedijanto (2004), meliputi :

- a. Kemandirian material, artinya memiliki kapasitas untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumberdaya alam yang mereka miliki sendiri tanpa harus menunggu bantuan orang lain atau tergantung dari luar;
- b. Kemandirian intelektual, artinya memiliki kapasitas untuk mengkritisi dan mengemukakan pendapat tanpa dibayangi oleh rasa takut atau tekanan dari pihak lain;

- c. Kemandirian pembinaan, artinya memiliki kapasitas untuk mengembangkan diri sendiri melalui proses belajar tanpa harus tergantung pihak luar; dan
- d. Sebagai manusia yang interdependensi, artinya dalam melaksanakan kegiatannya selalu terdapat saling ketergantungan dengan manusia lain di dalam masyarakatnya sebagai suatu sistem sosial.

4. Kebijakan Pemerintah

Dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani dijelaskan bahwa untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan diperlukan pelaku utama dan pelaku usaha profesional, andal, berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis. Oleh karena itu, pelaku utama dan pelaku usaha mampu membangun usahatani yang berdaya saing dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan posisi tawarnya.

Untuk mendukung kapasitas dan kemampuan pelaku utama dan pelaku usaha yang harus ditingkatkan, maka salah satu caranya adalah melalui penyuluhan dengan pendekatan pembinaan kelembagaan petani yang mencakup penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani, sehingga petani dapat berkumpul untuk menumbuhkembangkan kelembagaannya menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan.

Pemberdayaan petani, kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) menjadi kelembagaan yang mandiri dan berdaya saing, dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu :

- a. Pemberdayaan petani melalui pelatihan dan magang di bidang pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, dan ketahanan pangan di P4S;
- b. Penumbuhan dan pengembangan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes);
- c. Pengembangan kelembagaan petani dan KEP melalui pengembangan jejaring dan kemitraan usaha;

B. Hasil Pengkajian Terdahulu

Tabel 1. Ringkasan Beberapa Peneliti Terdahulu Mengenai Peran Anggota Kelompok Tani dalam Membangun Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui Sub Terminal Agribisnis (STA)

No	Judul/Tahun	Variabel	Metode Pengkajian	Hasil
1.	Tingkat Keaktifan Anggota Kelompok tani Di Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara (Erwandi Dan Ramainas, 2016)	- Tingkat Pendidikan, luas Garapan, Peran Penyuluh Pertanian dan Penerapan Fungsi Kelompok tani, umur, tingkat kosmopolitan dan lama berusaha tani.	Analisis data menggunakan skala likert dan regresi linear berganda	Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat keaktifan anggota kelompok tani dalam mengikuti kegiatan kelompok sebesar 76,16 persen dalam kategori aktif. Tingkat Pendidikan, luas Garapan, Peran Penyuluh Pertanian dan Penerapan Fungsi Kelompok tani, memberikan pengaruh sedangkan umur, tingkat kosmopolitan dan lama berusaha tani tidak berpengaruh.
2.	Peran Kelompok Tani Dalam Penerapan Teknologi Pertanian (Sri Nuryanti dan Dewa K.S. Swastika, 2011).	- Keunggulan Kelompok sebagai Wadah Kerjasama - Potensi dan kendala kelompok tani dalam penerapan teknologi dan prospeknya	Purposive sampling	Hasil Pengkajian menunjukan bahwa Petani yang ingin mendapat teknologi baru dan berbagai program bantuan pemerintah harus menjadi anggota kelompok atau anggota Gapoktan. Dengan demikian, peran kelompok tani tidak hanya sebagai media untuk menyalurkan bantuan-bantuan pemerintah, tetapi juga sebagai agen penerapan teknologi baru.
3.	Kajian Kelembagaan Pembangunan Pertanian Kasus Sub Terminal Agribisnis (STA)	- Permasalahan STA di beberapa daerah di Indonesia. - Pengertian, sasaran, peranan dan manfaat STA.	Purposive sampling	Sub Terminal Agribisnis (STA) merupakan salah satu struktur kelembagaan untuk mendorong pemasaran komoditas pertanian

Di Indonesia
(Pujiharto,2010).

yang dihasilkan di berbagai wilayah yang semakin beragam, dan memberikan jaminan kepastian harga produk yang dipasarkan oleh petani sebagai produsen sehingga harga yang diterima dapat menguntungkan para petani. Berbagai permasalahan muncul dalam penanganan STA antara lain lokasi yang cukup jauh dari sentra produksi dan ketergantungan permodalan usahatani pada pemberi modal yang sekaligus sebagai pedagang. Untuk itu perlu melakukan pemasaran produk pertanian dengan memfungsikan peran STA.

4. Peran Kepemimpinan Kontak Tani Dalam Proses Difusi Inovasi Teknologi Pengelolaan Tanaman Dan Sumberdaya Terpadu Padi (Hedi Heryadi,2012).
- kontak tani dan penyuluh pertanian, kepemimpinan kontak tani
- Metode eksplanator y research

Hasil Pengkajian menunjukkan bahwa kontak tani telah membantu kelompok untuk mencapai tujuan, meningkatkan komunikasi, meningkatkan motivasi petani, memfasilitasi infrastruktur pertanian, dan memecahkan masalah. Peran kontak tani sebagai agen penghubung dalam komunikasi dikategorikan memuaskan. Peran ini efektif digunakan dalam proses penyebaran inovasi PTT padi ke

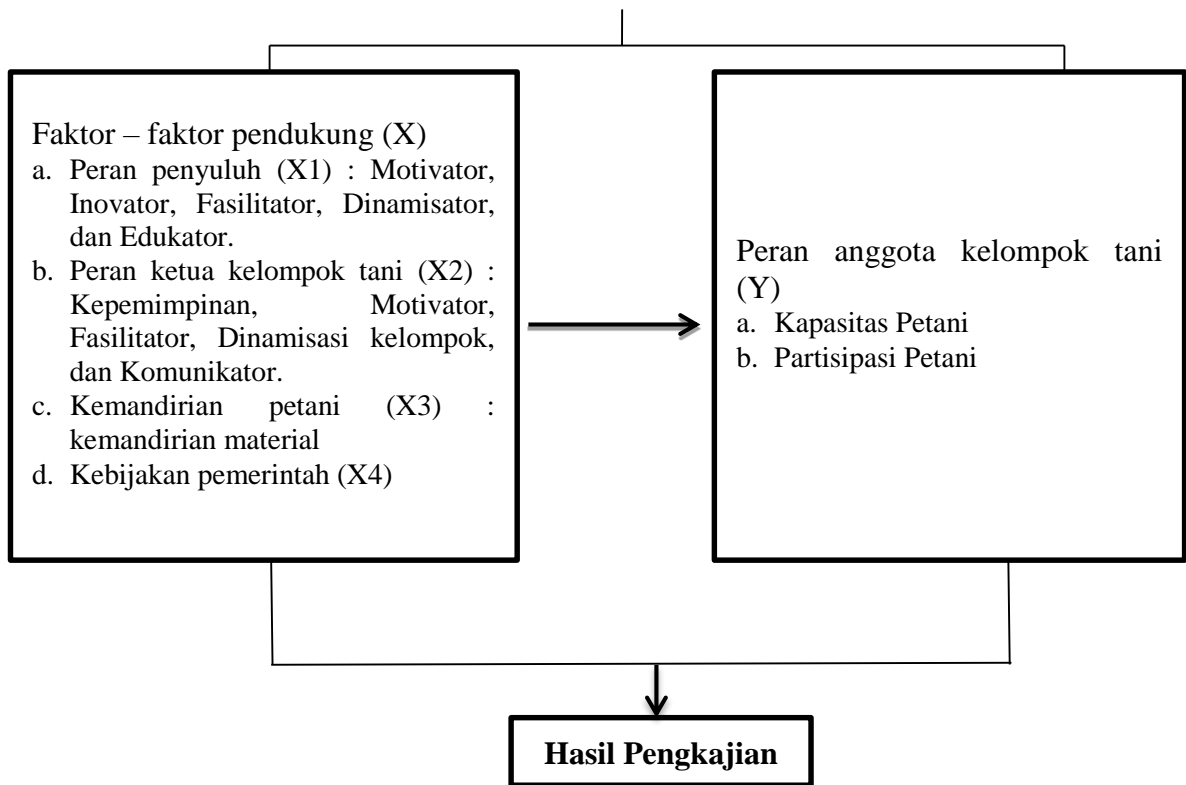
			petani.
5.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Anggota Kelompok Tani dalam Berusahatani: Kasus Usahatani Ikan Air Tawar di Desa Purwasari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Setiadin,H 2005)	- Pendidikan formal, pendidikan non formal, lama berusahatani, akses informasi kekosmopolitan, sarana usaha dan iklim usaha, umur, luas kolam, intensitas penyuluhan.	Uji Korelasi Rank Spearman Faktor-faktor internal dan eksternal yang berhubungan secara nyata dengan usaha petani dalam meningkatkan usahataninya ialah pendidikan formal, pendidikan non formal, lama berusahatani, akses informasi kekosmopolitan, sarana usaha dan iklim usaha, sedangkan untuk umur, luas kolam, intensitas penyuluhan, transportasi serta pasar tidak berhubungan secara nyata dengan usaha petani dalam meningkatkan usahataninya 2. Pada faktor-faktor internal dan eksternal yang berhubungan secara nyata dengan peran kelompok ialah pendidikan formal, lama berusahatani, akses informasi, kekosmopolitan, intensitas penyuluhan, sarana usaha, iklim usaha dan transportasi, sedangkan untuk umur, pendidikan formal, luas kolam dan pasar tidak berhubungan secara nyata dengan peran kelompok tani. 3. Pada peran kelompok tani berhubungan secara nyata dengan usaha petani dalam meningkatkan usahataninya, ialah

wahana belajar dengan penggunaan sarana produksi dan pemasaran usahatani, unit produksi dengan penerapan teknologi dan pemasaran usahatani, dan wahana kerjasama dengan penerapan teknologi dan pemasaran usahatani.

C. Kerangka Pikir

Upaya untuk menggambarkan peran serta anggota kelompok tani terhadap pembangunan Kelembagaan Ekonomi Petani secara menyeluruh dan terpadu diperlukan suatu perencanaan secara matang dan terarah. Perencanaan tersebut dituangkan dalam rencana kerja kelompok tani bersama penyuluh pertanian yang bertujuan untuk membangun suatu kelembagaan ekonomi petani yang mandiri, terstruktur, dan maju. Peran dari penyuluh, ketua kelompok tani, kemandirian petani, dan kebijakan pemerintah merupakan agen bagi perubahan perilaku para petani dan membantu petani untuk menerapkan serta menjalankan suatu usahatani dengan sistem kelembagaan yang mandiri, terstruktur, berkembang, memiliki daya saing pasar, dan maju melalui sub terminal agribisnis. Penyuluh memiliki beberapa tugas pokok yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Ketua kelompok tani memiliki peranan penting sebagai seorang pemimpin dalam suatu kelompok tani, hal ini didasari dengan adanya dorongan dan kebutuhan untuk meningkatkan hasil pertanian agar dapat mencukupi kebutuhan anggotanya maupun cakupan keluarga petani. Kemandirian petani dan kebijakan pemerintah turut serta ambil bagian dalam pembangunan Kelembagaan Ekonomi Petani di tingkat usaha tani yang mereka jalankan. Variabel dan indikator peran anggota kelompok tani ini dapat diukur melalui : Alur kerangka pikir dapat dilihat pada gambar 1.

Peran Anggota Kelompok Tani Dalam Membangun Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui Sub Terminal Agribisnis (STA) di Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara



Keterangan :

→ : mempengaruhi

Gambar 1. Kerangka Pikir